



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR



KANTOR KECAMATAN BURAU

RENCANA KERJA (RENJA)

2025



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU

Jl. Abdi Praja No. 1 Burau, Kode Pos : 92975
Website : kec-burau.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BURAU
NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN BURAU TAHUN 2025

CAMAT BURAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Kerja Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dan menyelaraskan dengan RENSTRA 2021-2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Burau Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah di ubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Luwu Timur 124);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BURAU TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN BURAU TAHUN 2025.

- KESATU : Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Burau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Burau
pada tanggal : 22 Juli 2024
Camat,

AKBAR BAHAR, S.E.

Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a

NIP : 19791226 201101 1 009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur disusun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

Rencana Kerja (RENJA) pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis pula. Renja ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada Hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 dengan tetap berdasarkan pada RENSTRA 2021-2026 serta berbagai kekuatan/ potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis didalamnya yang mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program yang realistis dalam mengantisipasi masa depan sesuai dengan yang diharapkan.

Kami berharap Rencana Kerja ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Kecamatan Burau. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Kantor Kecamatan Burau masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Burau, 22 Juli 2024

C A M A T,

AKBAR BAHAR, S.E.

Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a

NIP : 19791226 201101 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN	
BURAU TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra kantor Kecamatan Burau	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Burau	26
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	28
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	40
3.1. Telaahan Arah Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD	41
3.3. Program dan Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	56
BAB V PENUTUP.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD). Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu Perencanaan pembangunan daerah dimaksud adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Burau tahun 2025, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu :

“Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Dalam proses pencapaian visi tersebut, penyusunan Rencana Kerja SKPD berdasarkan Misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur adalah Misi Ke 4 yaitu :

“Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik”

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kantor Kecamatan Burau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka penetapan dokumen Rencana Kerja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagai berikut :

1. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (Outcome) indikator kinerja keluaran (Output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Kantor Kecamatan Burau mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja merupakan acuan OPD untuk mengakomodir program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

2. Rencana Kerja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Burau Tahun 2025 merupakan pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Burau. Oleh karena itu, dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tentunya diperlukan perencanaan yang baik, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Burau Tahun 2025:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024);
21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Burau Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (Satu) tahun. Selain itu penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Burau Tahun 2024 dimaksudkan untuk :

1. Menjabarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Burau kedalam program/kegiatan tahunan.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. Menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan dapat tercapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan ditahun 2025.

4. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Kerja Kantor Kecamatan Burau Tahun 2025.
5. Memudahkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan di tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah:

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kantor Kecamatan Burau;
2. Menetapkan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Burau tahun 2025;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Burau Tahun 2025;
4. Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Burau Tahun 2025;
5. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Luwu Timur 2021-2026;
6. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kantor Kecamatan Burau Tahun 2025;
7. Sebagai bahan penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN BURAU TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Burau

- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Burau
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Burau
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN BURAU

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Burau
- 3.3 Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Burau

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN BURAU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Burau

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja merupakan keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai berdasarkan target yang telah ditetapkan dan berkaitan erat dalam penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pengukuran laporan kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan konsep dan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Indikator masukan (Input), untuk mengukur sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan;
2. Indikator keluaran (Output) merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
3. Indikator hasil (Outcome) merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun. Laporan tersebut menjelaskan tentang penggunaan anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Burau Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada table T-C. 29 atau table 2.1 sebagai berikut:

Tabel T.C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024
Kabupaten Luwu Timur

Kantor Kecamatan Burau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-2) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/2)
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	99,47	99,47	100	53,21	100,00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	2	2	2	100	2	6	60,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	2	2	2	100	2	6	60,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	2	2	2	100	2	6	60,00

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	50	10	10	10	100	10	30	60,00
7.1.1.2.01.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	96,5	100	100	100	100	100,00	100,00
7.1.1.2.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (orang)	23	23	23	23	100	23	23	100
7.1.1.2.01.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun (dokumen)	90	18	18	18	100	18	46	60,00
7.1.1.2.01.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang di administasikan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
7.1.1.2.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun (dokumen)	20	4	4	4	100	4	12	60,00
7.1.1.2.01.04.	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
7.1.1.2.01.04.07	Pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan retribusi yang disusun (dokumen)	60	12	12	12	100	12	36	60,00
7.1.1.2.01.05.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
7.1.1.2.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	27	25	-	-	-	-	-	-
7.1.1.2.01.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan (dokumen)	60	12	12	12	100	12	36	60,00

7.1.1.2.01.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	Jumlah ASN mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	27	3	5	1	20	5	9	33,00
7.1.1.2.01.06.	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (%)	100	99,79	100	100	100	100	34,12	34,12
7.1.1.2.01.06.01	Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	15	10	10	10	100	6	6	50,00
7.1.1.2.01.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	20	14	14	14	100	17	17	50,00
7.1.1.2.01.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan atau penggandaan yang disediakan (jenis)	6	6	6	6	100	6	6	50,00
7.1.1.2.01.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan (eksampler)	60	48	48	48	100	48	18	37,50
7.1.1.2.01.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	4.875	2.706	2.379	2379	100	3.015	976	32,37
7.1.1.2.01.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	1.280	1.108	885	885	100	878	346	39,41
7.1.1.2.01.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD penunjang perangkat daerah yang diadakan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00
7.1.1.2.01.07.02	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	1	-	1	1	100	-	-	-
7.1.1.2.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	3	3	-	-	-	-	-	-
7.1.1.2.01.07.06	Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	10	14	1	1	100	8	8	100,00
7.1.1.2.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	3	3	-	-	-	-	-	-

7.1.1.2.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	100	100	100	52,11	52,11
7.1.1.2.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	1.200	1.200	1.542	1.542	100	1.542	806	52,27
7.1.1.2.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	60	60	60	60	100	48	24	50,00
7.1.1.2.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan (jenis)	2	2	2	2	100	2	-	-
7.1.1.2.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	9	9	10	10	100	11	11	48,48
7.1.1.2.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	100	100	95,24	95,24	100	50,00	50,00
7.1.1.2.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	11	7	7	6	85,71	7	7	50,00
7.1.1.2.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	8	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.2.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	20	36	26	26	100	23	11	47,83
7.1.1.2.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	3	1	2	2	100	1	1	100
7.1.1.2.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	3	-	-	-	-	-	-	-

7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	68	100	-	-	100	-	-
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilimpahkan (%)	100	68	100	-	-	100	-	-
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar)	60	35	-	-	-	12	-	-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan (lembar)	2000	-	6	-	-	-	-	-
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	98,93	98,93	100	72,75	74,99
7.01.03.2.01.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	100	100	100	98,93	98,93	100	72,75	72,75
7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang)	150	150	140	137	97,86	140	137	99,98
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kader PKK desa yang diberdayakan (orang)	49	49	49	49	100	49	49	50,00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	-	100	100	100	100	50,00	50,00
7.01.04.2.01.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (%)	100	-	100	100	100	100	50,00	50,00

7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolksian Negara Republic Indonesia Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertical Di Wilayah Kecamatan	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (kasus)	3	-	4	4	100	4	2	50,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kali)	4	-	4	4	100	4	2	50,00
7.01.04.2.02.	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peaturan kepala daerah	persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (%)	100	-	100	100	100	100	50,00	50,00
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Pertauran Perundang-Undangan Dan/ Aau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan (kali)	12	-	4	4	100	4	2	50,00
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100	50,00	50,00
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	50,00	50,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	12	6	50,00
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASN PEMERINTAH DESA	Persentase penyelenggran pemrinthan desa yang berjalan sesuai standard an ketentuan perundangang yang berlaku	100	100	100	95,5	95,5	100	50,00	50,00
7.01.06.2.01.	Fasiltasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintaha desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100	100	100	95,5	95,5	100	50,00	50,00

7.01.06.2.01.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya (dokumen)	14	14	14	14	100	14	7	50,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang di tindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	-	-	-
7.01.06.2.01.17	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Persentase desa yang tertib administrasinya (%)	100	100	100	82	82	-	-	-
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan (Desa)	7	-	7	7	100	7	7	50,00

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Burau tahun 2025 selanjutnya dilakukan pengukuran capaian target kinerja dan daya serap anggaran program/ kegiatan RKPD tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut maka digunakan beberapa kriteria penilaian seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kriteria capaian kinerja dan realisasi anggaran

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	SIMBOL	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA 1 TAHUN
1	Sangat Tinggi	ST	$91 \% \leq 100 \%$
2	Tinggi	T	$76 \% \leq 90 \%$
3	Sedang	S	$66 \% \leq 75 \%$
4	Rendah	R	$51 \% \leq 65 \%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50 \%$

Dari hasil pengukuran tingkat capaian rata-rata realisasi kinerja dan keuangan pada evaluasi RKPD Tahun 2023, rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 99,5 % sedangkan untuk Realisasi Anggaran mencapai 98,15 %. Apabila menggunakan kategori interval 1 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, Evaluasi hasil RKPD Kantor Kecamatan Burau Tahun 2023 termasuk dalam kategori **“sangat tinggi”**, dan hasil realisasi anggaran termasuk pada kategori **“sangat tinggi”**.

Pada tahun 2023 Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur melaksanakan :

- a. 6 (Enam) Program;
- b. 13 (Tiga Belas) Kegiatan, dan
- c. 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan.

Capaian dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diatas diperoleh hasil yang bervariasi. Beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan terealisasi 100% dan ada pula realisasi yang kurang dari 100%, dengan rincian capaian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota:

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan terelasisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.36.445.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.36.196.100,00 atau 99,32%.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan terelasisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.4.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.226.800,00 atau 90,32%.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA SKPD Yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan terelasisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.3.725.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.429.900,00 atau 65,23%.

1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun tepat Waktu

dengan target kinerja sebanyak 10 dokumen dan terelasisasi sebanyak 10 dokumen atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.4.635.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.756.900,00 atau 59,48%.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya yang terbayarkan dengan target kinerja sebanyak 23 orang dan terelasisasi sebanyak 22 orang atau 94,57%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.2.219.110.550,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.182.846.756,00 atau 98,37%.

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen dan terelasisasi sebanyak 12 dokumen atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.23.609.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.23.600.000,00 atau 99,96%.

1.3. Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen dan terelasisasi sebanyak 4 dokumen atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.9.648.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.491.000,00 atau 98,37%.

1.4. Administasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1.4.1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun dengan target

kinerja sebanyak 4 dokumen dan terelasisasi sebanyak 4 dokumen atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.3.711.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.244.000,00 atau 87,42%.

1.5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.5.1. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen dan terelasisasi sebanyak 12 dokumen atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.8.954.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.689.500,00 atau 97,05%.

1.5.2. Bimbingan teknis imlementasi peraturan perundang-undangan

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan target kinerja sebanyak 5 orang dan terelasisasi sebanyak 3 orang atau 60%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.15.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.980.000,00 atau 69,49%.

1.6. Administrasi umum perangkat daerah

1.6.1. Penyediaan komponen instalasi listrik

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Komponen Instalsi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 9 jenis dan terelasisasi sebanyak 9 jenis atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.9.961.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.927.000,00 atau 99,66%.

1.6.2. Penyediaan bahan logistik kantor

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan dengan target kinerja sebanyak 17 jenis dan terelasisasi sebanyak 17 jenis atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar

Rp.13.203.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.13.193.000,00 atau 99,92%.

1.6.3. Penyediaan bahan cetak penggandaan

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 4 jenis dan terelasisasi sebanyak 4 jenis atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.20.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.20.569.400,00 atau 99,85%.

1.6.4. Penyediaan bahan bacaan peraturan peundang-undangan

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 60 Eksmplar dan terelasisasi sebanyak 58 Eksmplar atau 96,67%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.6.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.800.000,00 atau 96,67%.

1.6.5. Fasilitas kunjungan tamu

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Tamu Yang Difasilitasi kunjungannya dengan target kinerja sebanyak 2.200 orang dan terelasisasi sebanyak 2.129 orang atau 96,77%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.132.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.132.575.000,00 atau 99,91%.

1.6.6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Diselenggarakan dengan target kinerja sebanyak 900 kali dan terelasisasi sebanyak 887 kali atau 98,56%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.189.090.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.189.024.900,00 atau 99,97%.

1.7. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan.

1.7.1. Pengadaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah peralatan mesin lainnya yang diadakan dengan target kinerja sebanyak 7 Unit dan terelasisasi sebanyak 7 Unit atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.53.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.52.000.000,00 atau 98,11%.

1.8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan

1.8.1. Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang diadministrasikan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen dan terelasisasi sebanyak 12 dokumen atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.12.084.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.12.031.000,00 atau 99,56%.

1.8.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Rekening telepon/Internet, listrik dan air yang terbayarkan dengan target kinerja sebanyak 68 rekening dan terelasisasi sebanyak 68 rekening atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.38.433.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.32.835.919,00 atau 85,44%.

1.8.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah tenaga Jasa Pelayanan Yang Terbayarkan dengan target kinerja sebanyak 10 orang dan terelasisasi sebanyak 10 orang atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.138.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.138.000.000,00 atau 100%.

1.8.4. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor dengan target kinerja sebanyak 2 jenis dan terelasisasi sebanyak 2 jenis atau 100%,

sedangkan target anggaran sebesar Rp.15.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.550.000,00 atau 100%.

1.9. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan.

1.9.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dengan target kinerja sebanyak 6 unit dan terelasisasi sebanyak 6 unit atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.14.490.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.353.688,00 atau 71,45%.

1.9.2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja sebanyak 24 unit dan terelasisasi sebanyak 24 unit atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.25.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.25.018.000,00 atau 98,03%.

1.9.3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi dengan target kinerja sebanyak 1 unit dan terelasisasi sebanyak 1 unit atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.6.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.990.000,00 atau 99,83%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi yang Dilaksanakan dengan target kinerja sebanyak 4 Kegiatan dan terelasisasi sebanyak 4 Kegiatan atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.4.340.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.134.000,00 atau 100%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Angka Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan target kinerja sebanyak 170 orang dan terelasisasi sebanyak 170 orang atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.9.795.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.227.500,00 atau 97,41%.

3.1.2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah pembinaan kader PKK Desa dengan target kinerja sebanyak 108 Orang dan terelasisasi sebanyak 108 Orang atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.97.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.700.000,00 atau 99,03%.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan isntansi vertikal di wilayah kecamatan

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target kinerja sebanyak 4 kali dan terelasisasi sebanyak 4 kali atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.4.048.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.97.375.860,00 atau 99,44%.

4.1.2. Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat dengan target kinerja sebanyak 4 kali dan terelasisasi sebanyak 4 kali atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.4.134.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.048.000,00 atau 100%.

5. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

4.1.1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan dengan target kinerja sebanyak 12 kali dan terelasisasi sebanyak 12 kali atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.25.078.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.25.066.600,00 atau 99,95%.

6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

6.1. Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa

5.1.1. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa Yang di Fasilitasi Penyusunannya dengan target kinerja sebanyak 36

dokumen dan terelasisasi sebanyak 36 dokumen atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.2.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.950.000,00 atau 100%.

5.1.2. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang Melakukan Pembangunan Kawasan Pedesaan dengan target kinerja sebanyak 18 desa dan terelasisasi sebanyak 18 desa atau 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.4.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.490.000,00 atau 99,56%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Burau

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut.

Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Yang terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dan tingkat capaiannya dapat dilihat pada Tabel T-C. 30 atau tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Burau

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			78,00	80,00	85,00	90,00	85,31	85,01	87,00	90,00	
2	Nilai LAKIP			60	63	65,5	68,5	67,05	-	68,5	70	

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Burau sebagaimana tabel diatas sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan di Kecamatan Burau.

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2023 terkait pelayanan publik di Kecamatan Burau. Target dan realisasi pelayanan publik dengan menggunakan peraturan Menpan dan RB nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat. Pada Tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 80 dan terealisasi 85,31.

2. Nilai LAKIP.

Capaian Kinerja sasaran kedua ini diperoleh dari hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh tim SAKIP kabupaten, Untuk nilai LAKIP Tahun 2024, belum dapat disajikan disebabkan nilai tersebut belum dikeluarkan oleh Tim SAKIP Kabupaten, sehingga untuk memproyeksikan capaian kinerja

pada sasaran kedua ini, menggunakan capaian Nilai LAKIP Tahun 2023, dimana pada tahun 2023, sasaran ini ditargetkan senilai 63 dan terealisasi senilai 67,05.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2025 antara lain:

1. Kurangnya Aparatur Sipil Negara sehingga masih banyak posisi jabatan pelaksana yang masih kosong.
2. Kualitas sumber daya manusia masih kurang.
3. Sarana dan prasarana masih kurang dan belum memadai.
4. Sistem dan prosedur kerja yang belum maksimal.
5. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
6. Kurang berfungsinya peran kecamatan dalam tatanan organisasi kabupaten terkait hirarki dan koordinasi dalam struktur Pemerintahan Desa.

Rekomendasi dan Catatan Strategis

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.
- c. Meningkatkan kinerja aparat kecamatan sehingga dapat melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan bupati kepada camat
- d. Memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan.
- e. Meningkatkan pembinaan terhadap SDM aparatur Kecamatan dan perangkat desa dalam peningkatan kinerja Kecamatan dan pemerintahan desa

- f. Difungsikannya kembali Hirarki tata pemerintahan yang proporsional dengan pengawasan dan pengendalian yang persuasif.

2.4. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review adalah aktifitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Burau serta mengacu pada Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD). Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS).

Rancangan awal Renja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra SKPD dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang.

Adapun perbandingan antara Rencana Awal Renja 2025 dengan Hasil analisa kebutuhan Kantor Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur tahun 2025 dapat dilihat pada table T-C.31 atau tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kantor Kecamatan Burau

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21
	KECAMATAN BURAU				3.230.965.850					3.314.965.850	
07	UNSUR KEWILAYAHAN				3.230.965.850					3.314.965.850	
07.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				3.230.965.850					3.314.965.850	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	2.434.456.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	3.121.904.850	
07.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	40.333.932	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	28.634.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.071.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.819.000	

7.01.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokume n	3.375.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokume n	3.375.000	
7.01.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokume n	3.860.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokume n	3.625.000	
7.01.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	9.135.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	4.815.000	
7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	2.426.472.850	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	2.424.699.850	
7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/b ulan	2.402.987.850	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/b ulan	2.400.494.850	

7.01.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	23.485.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	24.205.000	
7.01.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang di administrasikan sesuai standar	100%	12.438.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang di administrasikan sesuai standar	100%	12.560.000	
7.01.01. 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	12.438.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	12.560.000	
7.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	22.649.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	29.322.000	
7.01.01. 2.05.03	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.061.000	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	4.146.000	
7.01.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	17.588.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Org	25.176.000	

7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	303.531.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	271.715.000	
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	9.305.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	9.305.000	
7.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	9.080.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	8.224.000	
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	17.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14.000.000	
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	6.000.000	
7.01.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	120.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	114.600.000	

7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	142.146.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	119.586.000	
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD penunjang perangkat daerah yang di adakan	100%	55.600.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD penunjang perangkat daerah yang di adakan	100%	40.200.000	
7.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	55.600.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	40.200.000	
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	191.011.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	253.314.000	
7.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.928.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.978.000	
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.233.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	47.526.000	

7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	7.850.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	7.850.000	
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	138.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	189.960.000	
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terpeliharaan dengan baik	100%	45.470.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terpeliharaan dengan baik	100%	101.660.000	
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	21.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	21.100.000	
7.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	14.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	11.440.000	

7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.120.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	69.120.000	
7.01	KECAMATAN BURAU				128.779.300	KECAMATAN BURAU					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	5.505.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7.225.000	
7.01.02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100%	5.505.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100%	7.225.000	
7.01.02. 2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5.505.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Laporan	7.225.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100%	80.320.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100%	95.823.000	
7.01.03. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%	80.320.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%	95.823.000	

7.01.03. 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembag a K emasyar akat an	17.002.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembag a K emasyar akat an	16.747.500	
7.01.03. 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	63.317.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.075.500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100%	14.275.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100%	14.275.000	
7.01.04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	9.910.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	9.910.000	
7.01.04. 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4.435.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4.435.000	

7.01.04. 7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	5.475.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Lap	5.475.000	
7.01.04. 7.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	4.365.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	4.345.000	
7.01.04. 7.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4.365.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Lap	4.345.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100%	25.068.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100%	27.493.000	
7.01.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	25.068.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	27.493.000	

7.01.05. 2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	25.068.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	27.493.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	7.185.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	8.045.000	
7.01.06. 2.01	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	100%	7.185.000	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	100%	8.045.000	
7.01.06. 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Dokumen	2.720.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Dokumen	3.580.000	
7.01.06. 2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	4.465.000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	4.465.000	
JUMLAH					3.230.965.850						3.274.765.850

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Arah Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut:

- a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional;
- b. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik
- c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip structure allow auction;
- b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;
- c. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM Aparatur;
- d. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi
- b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi
- c. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan pusat dan daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Untuk itu tujuan disusunnya Renja ini guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Tujuan dalam Renja ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu ***“Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya”*** sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur adalah ***Misi Ke-4 yaitu Menciptakan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik.***

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dalam Renja ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk satu tahun kedepan.

Berikut Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025:

Tabel 3.1.**Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Burau Tahun 2025**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Kalaena	Persentase Peningkatan Nilai IKM	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan Kalaena	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	68,5

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Burau adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesional aparatur Kecamatan Burau dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, pelaksanaan Kinerja Kantor Kecamatan Burau Tahun 2025 ditunjang dengan belanja operasi yang anggarannya diperuntukkan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Burau. Maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan:
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan:
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Sub Kegiatan :
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat meliputi Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa meliputi Sub Kegiatan :
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum meliputi Sub Kegiatan :
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
12. Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah meliputi Sub Kegiatan :
- Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah meliputi Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
14. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi Sub Kegiatan :
- Fasilitas penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

- Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.

Adapun Rencana Program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.33 atau Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan
Perkiraan Maju Tahun 2026 Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
				Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN BURAU				3.314.965.850				3.230.965.850
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.314.965.850				3.230.965.850
7.01	KECAMATAN				3.314.965.850				3.230.965.850
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	3.121.904.850	Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	2.434.456.400
07.01.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	28.634.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	40.333.932
7.01.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.819.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	25.071.000

7.01.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.375.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	3.375.000
7.01.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	3.860.000
7.01.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	4.815.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Laporan	9.135.000
7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	2.424.699.850	Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	2.426.472.850
7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.400.494.850	Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Orang/bulan	2.402.987.850
7.01.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	24.205.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 Laporan	23.485.000

7.01.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase BMD yang di administrasikan sesuai standar	100%	12.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	12.438.000
7.01.01. 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	12.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	12.438.000
7.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	29.322.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	22.649.000
7.01.01. 2.05.03	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	4.146.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	5.061.000
7.01.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Org	25.176.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Orang	17.588.000
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	271.715.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	303.531.000

7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	9.305.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Paket	9.305.000
7.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	8.224.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Paket	9.080.000
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Paket	17.000.000
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 Dokumen	6.000.000
7.01.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	114.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	120.000.000
7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	119.586.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	142.146.000

7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase BMD penunjang perangkat daerah yang di adakan	100%	40.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	55.600.000
7.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	40.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 Unit	55.600.000
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	253.314.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	191.011.000
7.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.978.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	7.928.000
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	47.526.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	37.233.000
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	7.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	7.850.000

7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	189.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	138.000.000
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terpeliharaan dengan baik	100%	101.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	45.470.000
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	21.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Unit	21.600.000
7.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	11.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24 Unit	14.750.000
7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	69.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	9.120.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	7.225.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	5.505.000

7.01.02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100%	7.225.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	5.505.000
7.01.02. 2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Laporan	7.225.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	5.505.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100%	95.823.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	80.320.000
7.01.03. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%	95.823.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	80.320.000
7.01.03. 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	16.747.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	17.002.500
7.01.03. 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.075.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	63.317.500

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100%	14.275.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	14.275.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	9.910.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	9.910.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4.435.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	4.435.000
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Lap	5.475.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	5.475.000
7.01.04.7.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	4.345.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	4.365.000
7.01.04.7.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Lap	4.345.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	4.365.000

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100%	27.493.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	25.068.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	27.493.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	25.068.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	27.493.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	25.068.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	7.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	14.946.750
7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	8.045.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	7.185.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100%	8.045.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	7.185.000

7.01.06. 2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Burai, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Dokumen	3.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18 Dokumen	2.720.000
---------------------	---	---	--	---------------	-----------	------------------------------------	--	------------	-----------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) berpedoman pada Renstra Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Burau merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENTRA) Kantor Kecamatan Burau. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Adapun Alokasi Anggaran Kantor Kecamatan Burau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran Kantor Kecamatan Burau Tahun 2025

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
	KECAMATAN BURAU		3.314.965.850	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		3.314.965.850	
7.01	KECAMATAN		3.314.965.850	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	3.121.904.850	
07.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	28.634.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.819.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.375.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2 Dokumen	3.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	4.815.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.424.699.850	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.400.494.850	Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	24.205.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	12.560.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	12.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	29.322.000	
7.01.01.2.05.03	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Dokumen	4.146.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	25.176.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	271.715.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Paket	9.305.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11 Paket	8.224.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	14.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 Dokumen	6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	114.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	119.586.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	40.200.000	

7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	40.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	253.314.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.978.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	47.526.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	7.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	189.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	101.660.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	21.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	11.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	69.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	7.225.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	7.225.000	

7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7.225.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	95.823.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	95.823.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	16.747.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.075.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	14.275.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	9.910.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4.435.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Lap	5.475.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.04.7.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	100%	4.345.000	
7.01.04.7.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Lap	4.345.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	27.493.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	27.493.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	27.493.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	8.045.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	8.045.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Dokumen	3.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	4.465.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Burau tahun 2025 merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2025, dengan mengintegrasikan dukungan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Burau. Penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan isu-isu strategis khususnya di Kecamatan Burau. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Burau pada tahun 2025, sehingga upaya Kantor Kecamatan Burau dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Burau, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, tapi secara substansial ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Rencana Kerja Kantor Kecamatan Burau Tahun 2025 ini disusun untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dibutuhkan kritik dan saran untuk perbaikan dimasa selanjutnya, dan atasnya diucapkan terima kasih.

Burau, 22 Juli 2024
C A M A T,

AKBAR BAHAR, S.E.
Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a
NIP : 19791226 201101 1 009